



**BANKESBANGPOL
KABUPATEN
TEMANGGUNG**

RENCANA KERJA 2027

**BADAN
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK**

Jl Setia Budi No.1 Temanggung

Telp (0293) 491048 Faximilie (0293) 4913113

Email : Kesbangpoltemanggung672@gmail.com

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. SETIA BUDI NO. 1 TELP. (0293) 491048
TEMANGGUNG 56212

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2027

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 20 Juli 2026

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan



EWIEK KHAVIDA, S.STP.,M.M.
NIP. 198311182002122001

Petugas Verifikator,



FIKA HIDAYAH LUSIANI, ST
NIP. 197909242003122006

Mengetahui,



KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

DR. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2027.

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk satu tahun ke depan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025-2029. Dengan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun di tahun 2027.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 ini.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 17 Juli 2026

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG,



TRI RAHARJO, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19701223 199009 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN VERIFIKASI..... ii

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum..... 6

1.3. Maksud dan Tujuan 9

1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029. 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.. 19

2.1.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) 19

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 27

2.4 Telaah Pokok Pikiran DPRD 29

2.5 Review terhadap rancangan awal RKPD..... 30

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 43

2.7 Inovasi Perangkat Daerah 43

2.8 Penghargaan..... 44

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 45

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 45

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik . 45

3.3 Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 47

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... 65

4.1 Program dan Kegiatan 65

BAB V KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSANN..... 70

5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027..... 70

BAB VI PENUTUP 71

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026 Kabupaten Temanggung 11

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung 19

Tabel 2. 3 Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025 29

Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027 32

Tabel 2. 5 Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kabupaten Temanggung..... 43

Tabel 2. 6 Daftar Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 43

Tabel 2. 7 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 44

Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja 46

Tabel 3. 2 Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2027 48

Tabel 4. 1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan 66

Tabel 5. 1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

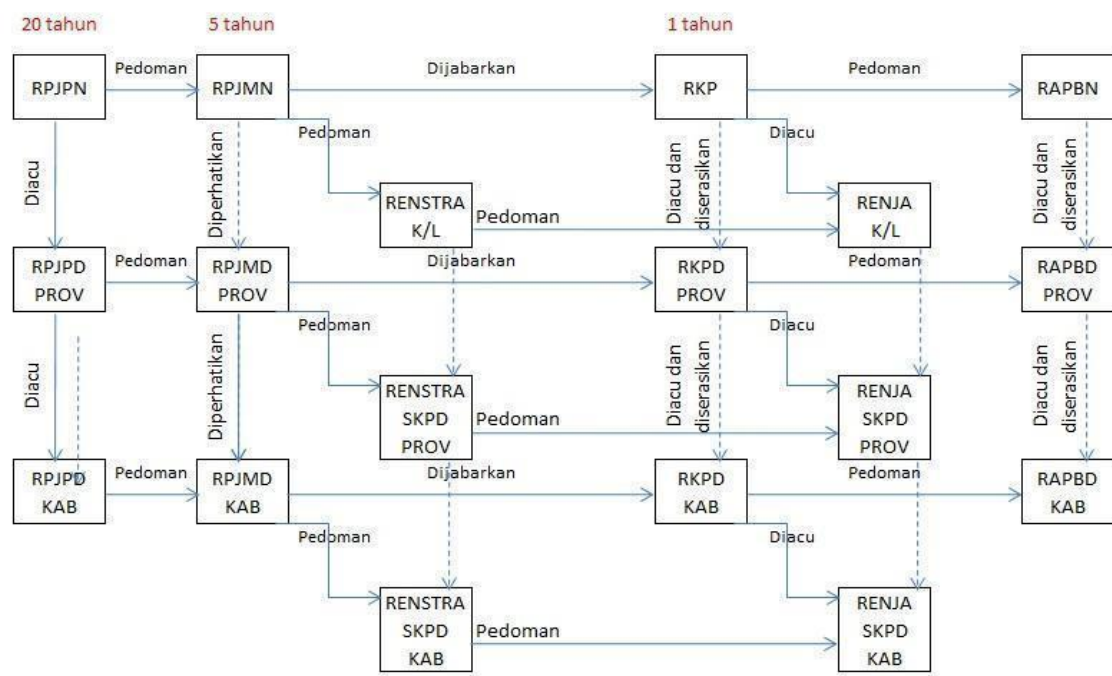
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2027 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2027.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2027 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Kondisi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4) Data Pokok Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan

7) Informasi lain terkait pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Analisis gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, dan realisasi tahun 2026 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- 4) Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025;
- 5) Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi urusan terkait).

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

- Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

- 22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- 23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 adalah sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 adalah antara lain sebagai berikut:

- 1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
- 2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu Tahun 2027;
- 3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027;
- 4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027; dan
- 5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029.

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 terhadap capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun berjalan terhadap target yang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 telah dapat dilakukan dengan menggunakan capaian kinerja Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2025-2029. Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026 Kabupaten Temanggung

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
8.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	%	100	100	100	100	3.111.705.215	33,00	838.606.147	33
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji tunjangan ASN	orang/ bulan	23	23	100	23	2.739.457.598	21	777.190.441	91,30
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	10	10	100,00	10	4.750.000	1	0	10,00
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	0	0	0,00	3	16.118.137	0	0	0,00
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	12	100,00	12	14.250.000	3	642.000	25,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
8.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12	100,00	12	9.500.000	3	162.000	25,00
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	100,00	12	11.400.000	3	575.000	25,00
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	100,00	12	47.500.000	3	992.000	25,00
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
8.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	100,00	12	29.364.880	3	4.149.316	25,00
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	100,00	12	5.700.000	3		25,00
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	100,00	12	178.089.600	3	47.226.309	25,00
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	12	12	100,00	12	42.750.000	3	7.099.081	25,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	100,00	2	5.700.000	1		50,00
8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	12	12	100,00	12	7.125.000	3	570.000	25,00
01.02	PRGOGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	100	100	100	540.000.000	80,29	7.534.500	80,29
01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										
01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	dokumen				2	35.000.000	0	0	0,00
8.1.2.201.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	Orang	350	1.102	100,00	350	505.000.000	281	7.534.500	80,29

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
		Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa									
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	%	100	100	100	100	1.832.819.500	0,00	2.649.000	0,00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	dokumen	12	12	100,00	10	1.832.819.500	0	2.649.000	0,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
	Pemantauan Situasi Politik di Daerah										
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	%	16,67	31,25	100	20	20.000.000	32,65	1.668.000	100,00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan										
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	laporan	11	11	100,00	1	20.000.000	0	1.668.000	0,00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Kejadian Konflik SARA	kejadian	8	1	100	8	90.000.000	1	0	100,00
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya										

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	120	120	100,00	120	50.000.000	0	0	0,00
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	100	1	40.000.000	0	0	0,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat	%	100	100	100	100	576.321.081	14,29	12.688.000	14,29
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial										
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelegen,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,	orang	200	200	100,00	100	194.863.750	26	9.500.000	26,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	laporan	72	72	100,00	11	381.457.331	0	3.188.000	0,00

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, 2026

Dari Tabel 2.1. evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
 - b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
 - e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
2. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.
3. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025, maka dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan nilai **99,78%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila 100 %
2. Meningkatnya demokrasi melalui pendidikan politik 100%
3. Meningkatnya ormas yang berdaya 100 %
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik 100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.1.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program. Adapaun penjelasan masing-masing indikator tercantum pada tabel 2.2 -2.5 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SE DANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
INDIKATOR KINERJA UTAMA									
1	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	86,95	87,56	88,17	81,79	81,79	100%	Sangat Tinggi
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	71,5	72,5	73,5	77,80	77,80	100%	Sangat Tinggi
3	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	%	100	100	100	100	100	100%	Sangat Tinggi
4	Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100%	Sangat Tinggi
INDIKATOR PROGRAM									
1	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100%	Sangat Tinggi
2	Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	%	100	100	100	100	100	0%	Sangat rendah
3	Persentase ormas yang mendapat pembinaan	%	19	20	23	31,25	0	100%	Sangat Tinggi
4	Jumlah kejadian konflik SARA	kejadian	8	8	8	2	0	100%	Sangat Tinggi
5	Persentase koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat	%	100	100	100	100	14.29	14,29%	Sangat Rendah

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, 2026

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. NILAI IKM PERANGKAT DAERAH

IKM perangkat daerah menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik, mengidentifikasi kelemahan, dan merumuskan kebijakan guna meningkatkan kualitas pelayanan di masa yang akan datang. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang didalamnya mengatur unsur-unsur yang harus ada pada kuesioner survei, kemudian data diolah sesuai ketentuan.

Rumus Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari nilai survei kepuasan masyarakat (SKM) unit pelayanan dikalikan dua puluh lima.

Faktor pendorong capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah kualitas layanan Badan Kesbangpol yang semakin baik dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan pendaftaran Organisasi Masyarakat, didukung dengan kemudahan dalam mengakses pendaftaran Organisasi masyarakat dan skill karyawan yang mumpuni.

Faktor penghambat capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran Ormas dan SDM Pelayanan yang terbatas/merangkap tugas lain.

Upaya dalam mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan semakin meningkatkan pelayanan baik melalui tatap muka maupun melalui media, dengan selalu bersikap ramah dan memberikan pelayanan cepat.

2. NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH

Nilai AKIP merupakan Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol pada n-1. Menilai dan mengevaluasi dokumen perencanaan Kinerja, dokumen pengukuran Kinerja, dokumen

Pelaporan kinerja, dan Evaluasi internal berdasarkan kriteria yang ada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap setahun sekali.

Rumus AKIP didapatkan dari hasil evaluasi AKIP yang terdiri 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Faktor pendorong tercapainya nilai AKIP Perangkat Daerah adalah adanya koordinasi dan kolaborasi antar bidang dalam pengumpulan data kegiatan, keselarasan Dokumen Perencanaan perangkat daerah, adanya tindak lanjut hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Faktor penghambat tercapainya nilai AKIP Perangkat Daerah adalah belum optimalnya pengolahan data kinerja, Keterbatasan SDM dan Kompetensi serta minimnya pemanfaatan teknologi di berbagai bidang.

Upaya dalam meningkatkan nilai AKIP Perangkat Daerah adalah dengan memperbaiki perencanaan kinerja yang selaras dengan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

3. PERSENTASE TERTANGANINYA KONFLIK DI MASYARAKAT

Konflik adalah Perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional (Bidang Kesatuan Bangsa, Bankesbangpol 2024). Dalam penanganan konflik di masyarakat perlu diwaspadai potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum yang dapat berupa aksi unjuk rasa atau demonstrasi, serta munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau benturan suku agama dan ras. Persentase tertanganinya konflik di masyarakat dihitung dengan rumus jumlah

konflik yang tertangani dibagi jumlah konflik keseluruhan dikali 100%.

Faktor pendorong tercapainya indikator persentase tertanganinya konflik di masyarakat adalah adanya sinergitas tim kewaspadaan dini daerah untuk pengawasan sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah.

Faktor penghambatnya adalah munculnya ego sektoral dari berbagai pihak dalam penyelesaian konflik.

Upaya yang dilakukan diantaranya dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah; serta pengoptimalan tim kewaspadaan dini daerah.

4. PERSENTASE POTENSI KONFLIK YANG DITINDAKLANJUTI

Potensi konflik adalah kemungkinan terjadinya konflik yang sebenarnya, yang berasal dari adanya perbedaan, ketegangan, atau perselisihan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. (Bidang Kesatuan Bangsa, 2025)

Potensi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti perbedaan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan kurangnya komunikasi. Identifikasi potensi konflik sangat penting untuk melakukan upaya pencegahan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi konflik terbuka yang mengancam keamanan dan stabilitas.

Persentase Potensi Konflik yang ditindaklanjuti dihitung dengan rumus jumlah potensi konflik yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah data konflik yang masuk.

Faktor pendorong indikator potensi konflik yang ditindaklanjuti yaitu terjalin kerjasama yang baik dalam pencegahan dini, identifikasi, dan mediasi terhadap segala macam isu/laporan yang memicu timbulnya konflik

Faktor Penghambatnya adalah kurangnya pelatihan khusus (seperti pelatihan intelijen) dapat menghambat efektifitas deteksi dini potensi konflik

Upaya dalam persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi meredam potensi konflik, membangun sistem deteksi dini pencegahan timbulnya konflik.

B. INDIKATOR PROGRAM

1. PERSENTASE PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan adalah ukuran tingkat keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Bankesbangpol dalam menanamkan, memperkuat dan membudayakan nilai-nilai Pancasila serta meningkatkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Temanggung.

Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dihitung dengan rumus Jumlah masyarakat yang diberi pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah masyarakat ditargetkan pembinaan wawasan kebangsaan dikali 100%.

Faktor pendorong persentase penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan adalah banyaknya kegiatan yang mendukung dalam menyampaikan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.

Faktor Penghambatnya adalah menurunnya nasionalisme sehingga banyak yang kurang tertarik dengan wawasan kebangsaan.

Upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan adalah dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat melalui event-event sosialisasi yang ada.

2. PERSENTASE PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pada Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah.

Rumus Persentase pelaksanaan pendidikan politik dihitung dengan rumus Jumlah pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik dibagi dengan jumlah pendidikan politik yang direncanakan oleh partai politik dikali 100%.

Pelaksanaan pendidikan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan wujud pengembangan demokratisasi. Berikut ini adalah tabel Persentase pelaksanaan kegiatan Pendidikan politik pada Tahun 2026.

Faktor pendorong indikator persentase pelaksanaan pendidikan politik adalah banyak kegiatan yang mendukung dalam menyampaikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Faktor penghambatnya adalah menurunnya minat masyarakat terhadap pendidikan politik.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diantaranya adalah dengan memberikan informasi/pengetahuan kepolitikan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol dan kegiatan lembaga lain yang melibatkan Badan Kesbangpol.

3. PERSENTASE ORMAS YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. (UU Nomor 17 Tahun 2013)

Pembinaan terhadap ormas dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan keanggotaan Ormas. Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan dihitung dengan rumus jumlah organisasi masyarakat yang mendapat pembinaan dibagi jumlah organisasi masyarakat keseluruhan dikalikan 100%.

Faktor pendorong indikator Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan adalah banyak kegiatan yang mendukung dan melibatkan organisasi masyarakat di Kab Temanggung dan antusiasme dari organisasi masyarakat tinggi.

Faktor Penghambat adalah kurangnya koordinasi jika ada ormas yang berpindah kesekretariatan dan berganti nomor telepon, sehingga menyebabkan putusnya komunikasi

Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diantaranya adalah penguatan pembinaan kepada organisasi

masyarakat dengan melibatkan pada kegiatan-kegiatan yang ada di Badan Kesbangpol.

4. JUMLAH KEJADIAN KONFLIK SARA

Definisi operasional Jumlah Kejadian Konflik SARA yaitu banyaknya kejadian yang dipicu oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam suatu wilayah.

Jumlah kejadian konflik SARA adalah ukuran yang digunakan untuk memantau hubungan antar sesama umat beragama yang dilandasi pada toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai sehingga dapat membentuk hubungan berbangsa dan bernegara dengan baik dan dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan. Tidak adanya kejadian konflik SARA maka dapat diinterpretasikan bahwa telah tingginya tingkat toleransi dan upaya dalam deradikalisasi telah berhasil.

Jumlah kejadian konflik SARA merupakan IUP yang dihitung dengan target menurun mulai tahun 2025 s.d 2045. Dengan target akhir 0 (nol) kejadian pada tahun 2045.

Faktor pendorong dalam menekan jumlah kejadian konflik SARA yaitu adanya edukasi dan pemahaman tentang keberagaman, penguatan sikap toleransi dan saling menghormati, penegakan hukum yang tegas, penerapan pendidikan karakter, serta pemeliharaan persatuan dan kesatuan.

Faktor Penghambat Adalah adanya keberagaman budaya, adanya masyarakat yang belum memahami ajaran agamanya secara utuh sehingga menganggap golongannya yang paling benar.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menekan konflik SARA :

1. Melaksanakan monitoring dinamika situasi sosial politik ekonomi dan keamanan daerah
2. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat
3. Mewujudkan interaksi sosial melalui kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan guna harmonisasi elemen masyarakat
4. Penguatan koordinasi antar kelembagaan baik lembaga vertikal maupun horizontal
5. Mengoptimalkan komunitas intelijen daerah

5. PERSENTASE KOORDINASI DETEKSI DINI KONFLIK DI MASYARAKAT

Koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kewaspadaan Dini Konflik dan Forkopimda menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah di sebutkan bahwa Forkopimda kabupaten/kota melaksanakan kegiatan:

- a. Koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/ atau masyarakat di wilayah kabupaten/kota;
- b. Koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota;
- c. Koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kabupaten / kota; Berdasarkan pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan yang mencakup urusan pemerintahan umum mencakup :
 - 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
 - 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
 - 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
 - 4) Penanganan konflik sosial
 - 5) Koordinasi antar instansi pemerintahan
 - 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
 - 7) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- d. Deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota; dan
- e. Kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah kabupaten/kota dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumus penghitungan persentase koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat yaitu Jumlah koordinasi deteksi dini konflik yang dilaksanakan dibagi jumlah koordinasi deteksi dini konflik yang direncanakan.

Faktor pendorong persentase koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat yaitu telah terjalin komunikasi yang baik dalam pertukaran informasi deteksi dini konflik di masyarakat, partisipasi aktif tim kewaspadaan dini daerah dan komunitas intelijen daerah,

Faktor Penghambat koordinasi antar Forkopimda belum optimal.

Upaya dalam mencapai persentase koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat yaitu melibatkan admin forkompimda dalam pengumpulan data, melaksanakan rapat koordinasi, forum diskusi, dan sistem pelaporan untuk meningkatkan kewaspadaan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui dialog, forum, dan sistem peringatan dini.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari 9 indikator tidak terdapat indikator yang belum mencapai target 100 %.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :
 - a. Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai
 - Belum tersedia Aula yang representatif sehingga kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, rapat koordinasi, maupun sosialisasi tidak dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan ruang.
 - Terbatasnya fasilitas teknologi informasi terbatas seperti perangkat komputer dan printer.

- Kendaraan operasional minim untuk mobilitas petugas Kesbangpol untuk melakukan monitoring lapangan dan koordinasi ke luar daerah.
 - Ruang kerja pegawai kurang memadai karena kondisi kantor yang sempit dan kurang nyaman berdampak pada produktivitas pegawai serta citra pelayanan publik.
- b. Keterbatasan SDM dalam satu bidang tidak terdapat fungsional pelaksana atau staf teknis.
 - c. Tidak terdapat anggaran untuk fasilitasi hibah FKUB.
 - d. Partisipasi masyarakat rendah karena kegiatan politik dan kebangsaan kurang.
 - e. Kurangnya koordinasi dengan Forkopimda.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah maupun pencapaian program nasional antara lain:
 - a. Peningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik menjadi sulit tercapai karena beban kerja tidak seimbang dengan kapasitas SDM.
 - b. Kegiatan FKUB tidak optimal karena tidak ada tidak difasilitasi.
 - c. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penguatan ideologi Pancasila menjadi terhambat, berpotensi menimbulkan apatisme politik.
 - d. Kurangnya koordinasi dengan Forkopimda menyebabkan Persentase koordinasi deteksi dini konflik masih rendah untuk mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif dan responsif terhadap isu politik dan keamanan daerah.
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :
 - Rendahnya kualitas demokrasi Masyarakat;
 - Peran Ormas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan belum maksimal;
 - Adanya ego dan fanatisme terhadap ajaran agama yang menghambat harmoni kerukunan umat beragama;
 - Menurunnya implementasi Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan; dan
 - Adanya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan terhadap NKRI terkait jaringan terorisme, radikalisme dan potensi konflik keamanan daerah

5. Formulasi isu-isu penting

Untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan SDM sebagai isu strategis daerah, Badan Kesbangpol mengangkat isu strategis perangkat daerah sebagai berikut:

- Meningkatkan peran Pemerintah bersama masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penguatan mitigasi terhadap timbulnya konflik yang mengganggu stabilitas sosial ekonomi, budaya dan politik
- Peningkatan demokratisasi dengan penguatan partisipasi politik dan membangun kemitraan strategis melalui pemberdayaan organisasi kemasyarakatan
- Badan Kesbangpol mengangkat isu penguatan ideologi Pancasila dan wawasan Kebangsaan serta P4GN guna mendukung kinerja Badan Kesbangpol 5 tahun kedepan.

2.4 Telaah Pokok Pikiran DPRD

Kamus usulan kegiatan merupakan kelompok usulan permasalahan yang disusun dalam SIPD yang sudah disesuaikan dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah (Program prioritas yang yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029). Tujuan penyusunan Kamus kegiatan adalah untuk memastikan agar usulan kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Verifikasi yang dilakukan mulai dari User sekretariat DPRD sampai dengan user Perangkat daerah adalah untuk memastikan kembali bahwa usulan permasalahan/kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD telah sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Pada Bankesbangpol tidak terdapat rumusan Kamus kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD dalam SIPD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3 Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

BIDANG URUSAN	URAIAN PERMASALAHAN	OPD TUJUAN	PROGRAM
NIHIL			

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, 2026

2.5 **Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu sejumlah 1 (satu) sub kegiatan Pembentukan Paskibraka.
2. Penambahan anggaran pada sub kegiatan :
Fasilitasi Kunjungan Tamu untuk Memenuhi kebutuhan kunjungan tamu dan koordinasi dari lintas sektoral, ormas dan partai politik, dan lain-lain.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD menambah kebutuhan BBM pada rapat koordinasi ke Luar Daerah belum teranggarkan.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Pembelian Kursi Eselon Dan Laptop
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk menambah Gaji Ke 13 dan THR bagi PPPK Paruh Waktu
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah untuk Pembinaan ormas, anggaran belum mendukung untuk pembinaan ormas sejumlah 197
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah untuk Penambahan Hibah FKUB, Fasilitasi dan monitoring Penggunaan hibah FKUB
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di

Daerah untuk Sarasehan Forkompimda dan biaya operasional monitoring kewaspadaan dini

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut

Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
1	PEMERINTAHAN UMUM						1	PEMERINTAHAN UMUM							
	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					6.120.845.796		BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.111.705.215	A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Temang gung	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjungan	23	Orang/ bulan	2.739.457.598		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tema nggu ng	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjungan	23	Orang/ bulan	2.739.457.598		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temang gung	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjungan	23	Orang/ bulan	2.739.457.598		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tema nggu ng	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjungan	23	Orang/ bulan	2.739.457.598		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Temang gung				1.500.000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tema nggu ng				1.500.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	1.500.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	1.500.000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Temang gung				95.000.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tema nggu ng				107.500.000		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temang gung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	3.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	3.000.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temang gung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	15.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	15.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temang gung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	6.000.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	6.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temang gung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Paket	12.500.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Paket	17.500.000	Memenu hi kebutuha n kunjunga n tamu dan koordina si dari lintas sektoral, ormas dan partai politik, dan lain-lain
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temang gung	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Paket	45.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Paket	47.500.000	Memenu hi kebutuha n BBM pada rapat koordina si ke Luar Daerah

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
														yang belum teranggar kan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temang gung	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	10	Paket	13.500.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tema nggu ng	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	10	Paket	18.500.000	Pembelia n kursi eselon dan laptop
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					215.247.617		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					215.247.617	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temang gung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lapora n	29.158.017		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	29.158.017	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temang gung	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	Lapora n	5.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tema nggu ng	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	Laporan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temang gung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lapora n	181.089.600		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	206.357.532	Menamb ah Gaji Ke 13 dan THR bagi PPPK PAruh Waktu

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					60.500.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					60.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temang gung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Lapora n	42.500.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Laporan	42.500.000	Penamba han bea pajak kendaraa n
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor/bangunan lainnya	Kab. Temang gung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	unit	11.500.000		Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor/bangunan lainnya	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	unit	11.500.000	
	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Kab. Temang gung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10	Unit	6.500.000		Pemeliharaan / rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10	Unit	6.500.000	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100	%	535.000.000		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100	%	535.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					535.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					535.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Temang gung	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2	Dokume n	35.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2	Dokumen	35.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Temang gung	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350	orang	0		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350	orang	0	
	Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka	52	Orang	500.000.000		Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka	52	Orang	500.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	100	%	1.832.819.500		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	100	%	1.847.819.500	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	10	Dokumen	1.832.819.500		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	10	Dokumen	1.847.819.500	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun					Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	100	%	25.000.000		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT AN		Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	100	%	35.000.000 35.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					25.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					35.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi	12	Lapora n	25.000.000		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	12	Laporan	35.000.000	Pembina an ormas, anggaran belum menduku ng untuk pembina an ormas sejumlah

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah kejadian konflik SARA	8	Kejadia n	90.000.000 90.000.000		Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah kejadian konflik SARA	8	Kejadian	90.000.000 90.000.000	197 di tahun 2025 (Program Prioritas Bupati)
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100	orang	50.000.000		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100	orang	100.000.000	Penamba han Hibah FKUB, Fasilitasi dan monitori ng Pengguna an hibah FKUB

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1	Dokumen	40.000.000		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1	Dokumen	50.000.000	Program prioritas Bupati ' - Kerjasama dengan universitas untuk pelaksanaan survey dan dan penghitungan indeks harmoni - Sosialisasi mengenai indeks harmoni
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat 1	100	%	144.863.750		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat 1	100	%	144.863.750	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			144.863.750		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			194.863.750	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100	orang	144.863.750		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100	orang	194.863.750	Sarasehan Forkompi mda dan biaya operason al untuk monitori ng kewaspa daan dini
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	72	Laporan	381.457.331		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	72	Laporan	381.457.331	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, 2026

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.

Tabel 2. 5 Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kabupaten Temanggung

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, 2026

2.7 Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi perangkat daerah dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ada 3 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Daftar Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Temannung bergerak melawan narkoba	Kesbangpol , BNN, PKK	APBD	Pembentukan dan pengukuhan relawan perempuan anti narkoba	Peningkatan peran perempuan (ibu) dalam keluarga untuk mencegah narkoba	Ketahanan keluarga akan membentuk keluarga sejahtera yang bebas dari narkoba	2024
2	Buku Tamu Digital (Kode QR)	Kesbangpol	-	Sistem online yang digunakan untuk mencatat kehadiran tamu secara digital menggunakan laptop, smartphone atau tablet.	Pengelolaan daftar tamu secara real-time, serta pelaporan statistik kehadiran yang dapat diakses kapan saja	Buku tamu digital menggantikan metode manual berbasis kertas dengan solusi yang lebih praktis dan efisien	2025
3	Optimalisasi Penyimpanan Dokumen Melalui Portal Berkeris (Bank Data Kegiatan)	Eky Rizky Prasetya, A.Md.Kom	APBD	a. Mendukung akuntabilitas pengelolaan dokumen kegiatan, anggaran, dan capaian	Mempermudah pengelolaan, pengawasan, evaluasi, serta pelaporan	Inovasi ini menghasilkan produk berupa Portal BERKERIS, yaitu sebuah sistem	2026

	Rencana Kerja dan Rencana Strategis) di BANKESBANGPOL Kabupaten Temanggung			kinerja melalui sistem digital yang terintegrasi. b. Mewujudkan layanan pengelolaan data yang efektif dan efisien dalam proses administrasi dan pelaporan kinerja. c. Meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan kecepatan dalam penyusunan laporan rencana kerja dan rencana strategis.	data kegiatan, anggaran, dan capaian kinerja secara terintegrasi dan real time. - Mempermudah pegawai dalam mengunggah, mengakses, dan mengelola dokumen kegiatan secara digital serta meningkatkan kemampuan literasi digital sebagai bagian dari kompetensi SMART ASN.	berbasis website yang digunakan sebagai media penyimpanan dan pengelolaan dokumen kegiatan, anggaran, serta capaian kinerja secara digital dan terintegrasi.	
--	--	--	--	--	---	--	--

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, 2026

2.8 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ada 2 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Penghargaan Bupati Temanggung atas prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dengan Predikat BB	Bupati Temanggung	Kabupaten	Bankesbangpol
2	Penghargaan Keberhasilan Pengukuran Indeks harmoni Tahun 2025.	Kemendagri	Nasional	Bankesbangpol

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, 2026

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dirumuskan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2025-2029 adalah “Mewujudkan kondusifitas wilayah melalui penanganan konflik” dengan sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatnya deteksi dini potensi konflik di masyarakat”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2027 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2027

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2027	TARGET KONDISI AKHIR 2029
Mewujudkan kondusivitas wilayah melalui penanganan konflik			Persentase tertanganinya konflik di masyarakat.	%	100	100
	Meningkat nya deteksi dini potensi konflik sosial di masyarakat		Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti	%	100	100
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	100
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	%	100	100
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapat pembinaan	%	23	29
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya	Jumlah kejadian konflik SARA	%	8	7
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat	%	100	100
	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	%	100	100

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029.

3.3 Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Tabel 3. 2 Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2027

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			6.120.845.796	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)		6.843.391.448	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			6.120.845.796	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)		6.843.391.448	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			6.120.845.796	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)		6.843.391.448	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.111.705.215	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)		3.145.708.198	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100 %	3.111.705.215	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	100%	3.145.708.198	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.500.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)		2.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1.500.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.500.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)		2.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.500.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.739.457.598	Kab. Temanggung			2.739.457.598	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.739.457.598	Kab. Temanggung		-	2.739.457.598	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.739.457.598	Kab. Temanggung			2.739.457.598	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.739.457.598	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2.739.457.598	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			96.500.000	Kab. Temanggung			111.750.000	
	-			96.500.000	Kab. Temanggung			111.750.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	15.000.000	Kab. Temanggung		-	16.500.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	47.500.000	Kab. Temanggung		-	50.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	13.000.000	Kab. Temanggung		-	14.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	4.500.000	Kab. Temanggung		-	7.250.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	-	3.000.000	Kab. Temanggung		-	4.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)
		Bangunan Kantor yang Disediakan							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	13.500.000	Kab. Temanggung		-	20.000.000	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.000.000	Kab. Temanggung			4.000.000	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.500.000	Kab. Temanggung			20.000.000	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	13.500.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			13.000.000	Kab. Temanggung			14.000.000	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	14.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4.500.000	Kab. Temanggung			7.250.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.500.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7.250.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			15.000.000	Kab. Temanggung			16.500.000	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	16.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			47.500.000	Kab. Temanggung			50.000.000	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	47.500.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			217.747.617	Kab. Temanggung			216.800.600	
	-								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	29.158.017	Kab. Temanggung		-	29.700.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	181.089.600	Kab. Temanggung		-	181.600.600	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
			(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	7.500.000	Kab. Temanggung		-	5.500.000	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			29.158.017	Kab. Temanggung			29.700.000	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.158.017	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	29.700.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.500.000	Kab. Temanggung			5.500.000	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	7.500.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			181.089.600	Kab. Temanggung			181.600.600	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	181.089.600	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	181.600.600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Kab. Temanggung				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			56.500.000	Kab. Temanggung			75.700.000	
	-			56.500.000	Kab. Temanggung			75.700.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	8.500.000	Kab. Temanggung		-	20.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	45.000.000	Kab. Temanggung		-	50.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	3.000.000	Kab. Temanggung		-	5.700.000	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			45.000.000	Kab. Temanggung			50.000.000	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	45.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			8.500.000	Kab. Temanggung			20.000.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	8.500.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.000.000	Kab. Temanggung			5.700.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	3.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5.700.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			535.000.000	Kab. Temanggung			1.055.000.000	
		Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	535.000.000	Kab. Temanggung		-	1.055.000.000	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			535.000.000	Kab. Temanggung			1.055.000.000	
		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi	-	35.000.000	Kab. Temanggung		-	40.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)
		Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	0	Kab. Temanggung		-	510.000.000	
		Jumlah Paskibraka	-	500.000.000	Kab. Temanggung		-	505.000.000	
8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			35.000.000	Kab. Temanggung			40.000.000	
	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	35.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	40.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			0	Kab. Temanggung			510.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350 Orang	0	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	510.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka			500.000.000	Kab. Temanggung			505.000.000	
	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	52 Orang	500.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	505.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			1.832.819.500	Kab. Temanggung			1.862.819.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	100 %	1.832.819.500	Kab. Temanggung		-	1.862.819.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
			(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			1.832.819.500	Kab. Temanggung			1.862.819.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	-			1.832.819.500	Kab. Temanggung			1.862.819.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-	1.832.819.500	Kab. Temanggung		-	1.862.819.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala			1.832.819.500	Kab. Temanggung			1.862.819.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)
	Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	1.832.819.500	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1.862.819.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			25.000.000	Kab. Temanggung			40.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase ormas yang mendapat pembinaan	20 %	25.000.000	Kab. Temanggung		-	40.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			25.000.000	Kab. Temanggung			40.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	-			25.000.000	Kab. Temanggung			40.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	25.000.000	Kab. Temanggung		-	40.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			25.000.000	Kab. Temanggung			40.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	25.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	40.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			90.000.000	Kab. Temanggung			160.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah kejadian konflik SARA	8 Kejadian	90.000.000	Kab. Temanggung		-	160.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			90.000.000	Kab. Temanggung			160.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	-			90.000.000	Kab. Temanggung			160.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	-	40.000.000	Kab. Temanggung		-	60.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	50.000.000	Kab. Temanggung		-	100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			40.000.000	Kab. Temanggung			60.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)
	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	40.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	60.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			50.000.000	Kab. Temanggung			100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	50.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
			(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			526.321.081	Kab. Temanggung			579.863.750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat1	100 %	526.321.081	Kab. Temanggung		-	579.863.750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			526.321.081	Kab. Temanggung			579.863.750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	-			526.321.081	Kab. Temanggung			579.863.750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	381.457.331	Kab. Temanggung		-	385.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	144.863.750	Kab. Temanggung		-	194.863.750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			144.863.750	Kab. Temanggung			194.863.750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	100 Orang	144.863.750	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	194.863.750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)
		serta Penanganan Konflik di Daerah							
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			381.457.331	Kab. Temanggung			385.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	72 Laporan	381.457.331	Kab. Temanggung	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	385.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
J U M L A H	6.120.845.796	6.843.391.448							

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, 2026

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2027 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi meliputi sub kegiatan:

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Fasilitas Kunjungan Tamu
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2027

RANCANGAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.120.845.796		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.120.845.796	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6.120.845.796		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6.120.845.796	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.120.845.796		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.120.845.796	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	372.247.617	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.111.705.215	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.739.457.598		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.739.457.598	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2.739.457.598		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2.739.457.598	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.000.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.500.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.500.000	(1.500.000)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.500.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000	500.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.500.000	(1.500.000)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	1.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.500.000	2.500.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.247.617		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.747.617	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.158.017		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.158.017	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000	2.500.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.089.600		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.089.600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.500.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.500.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.500.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.500.000	(3.000.000)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.500.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	(3.000.000)
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	535.000.000	II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	535.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	535.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	535.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	35.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	35.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500.000.000		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	(500.000.000)
	Pembentukan Paskibraka	0		Pembentukan Paskibraka	500.000.000	500.000.000
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.832.819.500	III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.832.819.500	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.832.819.500		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.832.819.500	

	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.832.819.500		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.832.819.500	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	25.000.000		IV PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	25.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	25.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	25.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25.000.000		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25.000.000	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	90.000.000		V PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	90.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	90.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	90.000.000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40.000.000		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50.000.000		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50.000.000	
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	526.321.081		VI PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	526.321.081	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	526.321.081		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	526.321.081	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	144.863.750		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	144.863.750	

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	381.457.331		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	381.457.331	
--	---	-------------	--	---	-------------	--

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2027

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2027.

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis operasionalnya. IKU menjadi prioritas utama untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi hasil renja 2025 dan target IKU tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (REALISASI)	TARGET TAHUN 2027	KETERAN GAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH					
Unsur Pemerintahan Umum					
Kesatuan Bangsa dan Politik					
1	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	81.79	88.17	
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	77.80	73.5	
3	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	%	100	100	
4	Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti	%	100	100	

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

BAB VI

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2027 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2027. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2027 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 96,78 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 13,99%.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2027 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp 6.120.845.796,00 yang terdiri dari 6 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik,

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 17 Juli 2026



KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG,


TRI RAHARJO, S.IP.,M.Si
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19701223 199009 1 001